

Analysis of the readiness of tempe UMKM UD. Bismillah in implementing fixed financial accounting standards in Delitua District

Atika Arif¹, Tri Inda Fadhila Rahma², Hendra Hermain³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: atikaariflubis64@gmail.com; triindafadhila@uinsu.ac.id; hendra.hermain@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan UMKM Tempe UD. Bismillah dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Kecamatan Delitua. Penerapan SAK ETAP merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM agar lebih relevan, andal, dan dapat diterima oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya dalam hal akses pembiayaan dan transparansi usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain *case study*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap praktik akuntansi yang dijalankan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Tempe UD. Bismillah berada pada tahap awal kesiapan, dengan sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana dan belum mengacu pada prinsip SAK ETAP. Faktor utama yang menghambat penerapan standar ini meliputi rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya peran instansi pendukung seperti dinas koperaasi dan UMKM. Namun demikian, terdapat potensi pengembangan melalui peningkatan kemauan pelaku usaha untuk belajar dan menerima pendampingan. Penelitian ini merekomendasikan adanya intervensi dari pihak terkait dalam bentuk pelatihan teknis, penyediaan modul SAK ETAP yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM, serta pembentukan program pendampingan berkelanjutan agar penerapan SAK ETAP dapat direalisasikan secara bertahap.

Kata Kunci: UMKM; SAK ETAP; kesiapan; laporan keuangan; studi kasus

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of readiness of Tempe MSME UD. Bismillah in implementing Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) in Delitua District. The implementation of SAK ETAP is an effort to improve the quality of MSME financial reports to make them more relevant, reliable, and acceptable to stakeholders, especially in terms of access to financing and business transparency. The research method used is a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, direct observation, and documentation of accounting practices carried out by business actors. The results of the study indicate that Tempe MSME UD. Bismillah is in the early stages of readiness, with a financial recording system that is still simple and does not refer to the principles of SAK ETAP. The main factors inhibiting the implementation of this standard include low accounting literacy, limited human resources, and the less-than-optimal role of supporting agencies such as the cooperative and MSME office. However, there is potential for development through increasing the willingness of business actors to learn and receive mentoring. This study recommends intervention from related parties in the form of technical training, provision of SAK ETAP modules tailored to the characteristics of MSMEs, and the establishment of a sustainable mentoring program so that the implementation of SAK ETAP can be realized gradually.

Keyword: MSMEs; SAK ETAP; readiness; financial reports; case studies

Corresponding Author:

Atika Arif,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Jl. Lapangan Golf No. 120, Kabupaten Deli Serdang, Indonesia
Email: atikaariflubis64@gmail.com



1. INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, maupun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap PDB nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi tersebut menjadikan UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, terutama di tingkat daerah, termasuk Kecamatan Delitua yang memiliki potensi ekonomi lokal pada sektor pangan dan industri olahan, seperti produksi tempe.

Meskipun memiliki peran strategis, UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan usaha, khususnya pada aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM belum menerapkan standar akuntansi secara konsisten dan masih menggunakan sistem pencatatan sederhana, bahkan tidak melakukan pencatatan keuangan secara formal (Nurfani et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kualitas informasi keuangan, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan, pengawasan kinerja usaha, serta menghambat akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai pedoman akuntansi yang lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik UMKM. SAK ETAP dirancang agar entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik tetap dapat menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan mudah dipahami (IAI, 2022). Namun, tingkat adopsi SAK ETAP di kalangan UMKM masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan literasi akuntansi, minimnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait (Febrianty & Divianto, 2017).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesiapan UMKM dalam menerapkan SAK ETAP dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sa'adah (2025) menemukan bahwa tingkat pendidikan pemilik, pengalaman usaha, serta kemampuan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan implementasi SAK ETAP. Sementara itu, dukungan pemerintah, pelatihan akuntansi, dan program pendampingan berkelanjutan juga terbukti memiliki peran signifikan dalam mendorong penerapan standar akuntansi pada UMKM (Amanda & Rialdy, 2024).

UD. Bismillah merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang produksi tempe di Kecamatan Delitua. Usaha ini telah beroperasi lebih dari lima tahun dan memiliki potensi pengembangan yang cukup besar. Namun, berdasarkan observasi awal, pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat konvensional dan belum mengacu pada standar akuntansi tertentu, termasuk SAK ETAP. Kondisi ini tercermin dari fluktuasi omzet penjualan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Omzet Penjualan Tempe UD. Bismillah

Bulan	Pendapatan
Januari	Rp47.250.000
Februari	Rp47.250.000
Maret	Rp56.700.000
April	Rp61.425.000
Mei	Rp42.525.000
Juni	Rp47.250.000
Juli	Rp54.337.500
Agustus	Rp51.975.000

Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi omzet yang cukup signifikan, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada bulan April dan penurunan pada bulan Mei. Fluktuasi ini mengindikasikan dinamika bisnis yang seharusnya dapat dianalisis dan dikendalikan dengan lebih baik melalui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai standar.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan UD. Bismillah belum terdigitalisasi secara optimal, sehingga menyulitkan proses evaluasi kinerja usaha, perencanaan keuangan, serta proyeksi arus kas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya efisiensi penggunaan dana dan menjadi hambatan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan yang mensyaratkan laporan keuangan formal dan akuntabel.

Secara teoretis, penerapan SAK ETAP dapat meningkatkan efisiensi manajemen keuangan, transparansi usaha, serta keberlanjutan UMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Dengan pencatatan keuangan yang terstruktur dan akurat, UMKM tidak hanya mampu mengetahui posisi laba dan rugi secara jelas, tetapi juga meningkatkan daya saing serta membuka peluang pengembangan usaha. Pendekatan kualitatif deskriptif dipandang tepat untuk menggambarkan praktik pengelolaan keuangan dan kesiapan implementasi SAK ETAP secara komprehensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018).

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih menekankan pada faktor pendorong dan penghambat implementasi SAK ETAP secara umum. Sementara itu, kajian mendalam berbasis studi kasus pada satu entitas UMKM di Kecamatan Delitua masih relatif terbatas. Padahal, Delitua merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat dan memiliki karakteristik usaha yang beragam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan UMKM Tempe UD. Bismillah dalam menerapkan SAK ETAP serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian empiris mengenai penerapan SAK ETAP pada UMKM, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam mendorong penguatan tata kelola keuangan UMKM secara berkelanjutan.

2. LITERATURE REVIEW

A. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2009 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Standar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan entitas skala kecil dan menengah, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum namun tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang memenuhi dua kriteria utama, yaitu: (1) tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan (2) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditur, pemegang saham non-pengelola, serta otoritas perpajakan. Dengan demikian, SAK ETAP dirancang untuk menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga lebih mudah diterapkan dibandingkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) penuh yang digunakan oleh perusahaan besar atau perusahaan terbuka.

SAK ETAP memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari PSAK penuh. Pertama, penyajian laporan keuangan dalam SAK ETAP bersifat lebih sederhana karena tidak mewajibkan konsolidasi laporan keuangan serta tidak mengatur instrumen keuangan yang kompleks. Kedua, komponen laporan keuangan yang diwajibkan bersifat minimal, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ketiga, basis pengukuran yang digunakan dalam SAK ETAP pada umumnya adalah biaya historis, sehingga lebih mudah diterapkan dibandingkan pengukuran berbasis nilai wajar. Keempat, pengungkapan informasi dalam SAK ETAP relatif lebih fleksibel dan tidak menuntut detail yang kompleks sebagaimana PSAK.

Sulistiyowati dan Prasetyo (2020) menyatakan bahwa karakteristik tersebut menjadikan SAK ETAP lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya manusia, modal, serta literasi akuntansi. Oleh karena itu, penerapan SAK ETAP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan UMKM secara bertahap.

Penerapan SAK ETAP memiliki beberapa tujuan utama, antara lain memberikan pedoman bagi entitas kecil dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, memfasilitasi penyediaan informasi keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami, serta meningkatkan akses pembiayaan UMKM ke lembaga perbankan karena laporan keuangan yang disusun sesuai standar cenderung lebih dipercaya oleh kreditur (Oktaritama & Januarti, 2020). Selain itu, penerapan SAK ETAP juga mendorong profesionalisme UMKM dalam mengelola usaha sehingga lebih siap bersaing di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif.

Manfaat nyata penerapan SAK ETAP bagi UMKM meliputi peningkatan kredibilitas laporan keuangan di mata pihak eksternal, peningkatan transparansi usaha, kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, serta dukungan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat berbasis data keuangan. Selain itu, dibandingkan PSAK penuh, SAK ETAP relatif lebih efisien dari sisi biaya penerapan karena kesederhanaan struktur dan pengungkapannya (Ramadhan et al., 2024).

Dalam konteks UMKM seperti Tempe UD. Bismillah, pemilihan antara SAK ETAP dan SAK EMKM perlu mempertimbangkan skala usaha serta kompleksitas transaksi keuangan. SAK EMKM umumnya lebih sesuai untuk usaha mikro dan kecil dengan struktur organisasi yang sederhana, sedangkan SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang lebih berkembang namun tetap tidak memiliki akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik dan manfaat SAK ETAP menjadi penting dalam menilai kesiapan UMKM untuk menerapkan praktik akuntansi yang lebih formal (Saputra & Fitriani, 2019).

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu terkait aset dan omzet. UMKM berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, serta peningkatan pendapatan masyarakat (Harahap et al., 2025).

Secara umum, UMKM memiliki karakteristik skala usaha yang relatif kecil, pengelolaan yang bersifat informal dan berbasis keluarga, serta keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan sumber daya manusia

yang kompeten. Meskipun jumlahnya sangat besar, sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala manajerial, terutama dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan (Jamil et al, 2022). Kelemahan dalam sistem akuntansi menyebabkan UMKM kesulitan dalam mengukur kinerja usaha secara akurat dan menghambat akses terhadap pembiayaan formal.

Sulistiyowati (2023) mengemukakan bahwa rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan umumnya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan akuntansi. Akibatnya, banyak UMKM masih mengandalkan pencatatan manual yang sederhana, bahkan tidak melakukan pencatatan keuangan secara sistematis.

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan, penerapan standar akuntansi sederhana seperti SAK ETAP menjadi langkah penting bagi keberlanjutan dan peningkatan kinerja UMKM. Namun, kesiapan pelaku UMKM dalam menerapkan standar tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pendidikan, pengalaman kewirausahaan, serta faktor eksternal berupa dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dan program pendampingan usaha (Hanifa et al., 2023).

Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajemen keuangan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembinaan akuntansi menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM mampu bertahan, berkembang secara berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing di era ekonomi digital.

C. Transparansi Keuangan dalam UMKM

Transparansi keuangan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penerapan tata kelola usaha yang baik (*good governance*), termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Transparansi keuangan mengacu pada keterbukaan dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, andal, dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, seperti pemilik usaha, mitra bisnis, pemerintah, serta lembaga keuangan (Nurfani et al., 2025).

Bagi UMKM, transparansi keuangan memiliki keterkaitan erat dengan praktik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Penerapan pencatatan keuangan yang tepat memungkinkan pelaku usaha menyajikan kondisi keuangan secara objektif dan terukur. Informasi keuangan yang transparan akan meningkatkan tingkat kepercayaan pihak eksternal, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan maupun investor (Candra & Hidayatullah, 2024).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan transparansi keuangan. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan akuntansi, persepsi bahwa akuntansi bukan prioritas utama bagi usaha kecil, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pencatatan keuangan (Candra, & Hidayatullah, 2024). Akibatnya, informasi keuangan yang dihasilkan sering kali tidak memadai untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis maupun evaluasi kinerja usaha.

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) maupun SAK EMKM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi keuangan UMKM. Kedua standar tersebut menyediakan kerangka kerja yang sistematis dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin, tertib, dan akuntabel dalam mencatat setiap transaksi keuangan (Ramadhan et al., 2024). Transparansi keuangan juga terbukti berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha dalam jangka panjang karena memungkinkan pelaku UMKM melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi usaha secara lebih akurat. Oleh karena itu, transparansi keuangan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai kebutuhan strategis bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

D. Efisiensi Keuangan dalam UMKM

Efisiensi keuangan dapat dipahami sebagai kemampuan suatu entitas, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan usaha dengan biaya yang minimal dan hasil yang maksimal. Tingkat efisiensi keuangan tercermin dari sejauh mana penggunaan dana mampu menghasilkan output yang diharapkan, baik berupa peningkatan pendapatan, pengendalian biaya, maupun penguatan daya saing usaha (Octavina & Rita, 2021).

Bagi UMKM, efisiensi keuangan memegang peranan yang sangat penting mengingat keterbatasan modal dan sumber daya merupakan karakteristik umum sektor ini. UMKM yang mampu mengelola keuangan secara efisien cenderung lebih terarah dalam melakukan perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, pengendalian biaya, serta evaluasi kinerja usaha. Salah satu prasyarat utama untuk mencapai efisiensi keuangan adalah penerapan sistem akuntansi yang sistematis, tertib, dan andal (Sulistiyowati, 2023).

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan seperti SAK ETAP secara langsung mendukung peningkatan efisiensi keuangan UMKM dengan menyediakan pedoman pencatatan yang memudahkan pelaku usaha dalam memantau arus kas, mengidentifikasi pemborosan, serta menilai profitabilitas usaha secara berkala. Penelitian oleh Nurfani et al., (2025) menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan prinsip akuntansi sederhana

memiliki tingkat efisiensi keuangan yang lebih baik dibandingkan UMKM yang tidak melakukan pencatatan keuangan secara teratur.

Selain faktor sistem pencatatan, efisiensi keuangan UMKM juga dipengaruhi oleh aspek manajerial, seperti pengetahuan akuntansi pemilik usaha, efektivitas pengendalian internal, serta kemampuan dalam mengelola kas, utang, dan persediaan. Amanda dan Rialdy (2024) menyatakan bahwa rendahnya efisiensi keuangan pada UMKM sering kali disebabkan oleh pengeluaran yang tidak tercatat, lemahnya pengelolaan kas, serta ketiadaan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan demikian, peningkatan efisiensi keuangan merupakan tujuan penting yang dapat dicapai melalui penerapan akuntansi yang baik, peningkatan kapasitas manajerial, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, efisiensi keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesiapan UMKM Tempe UD. Bismillah untuk mengimplementasikan SAK ETAP secara efektif dan berkelanjutan.

3. RESEARCH METHOD

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kesiapan UMKM Tempe UD. Bismillah dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara kontekstual, komprehensif, dan mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian (Sugiyono, 2019).

Metode deskriptif kualitatif dinilai tepat digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi yang bersifat eksploratif, khususnya ketika penelitian berfokus pada perilaku, pemahaman, serta kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi penerapan suatu kebijakan atau standar akuntansi tertentu (Nurfani et al., 2025). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami kondisi nyata praktik pencatatan keuangan yang dijalankan UMKM secara holistik.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM Tempe UD. Bismillah yang berlokasi di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa UMKM tersebut merupakan usaha yang telah berjalan cukup lama dan memiliki aktivitas keuangan yang rutin, namun belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi formal.

Objek penelitian difokuskan pada praktik pencatatan keuangan, tingkat pemahaman pemilik usaha terhadap SAK ETAP, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kesiapan penerapan SAK ETAP pada UMKM Tempe UD. Bismillah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam, dilakukan kepada pemilik UMKM Tempe UD. Bismillah untuk menggali informasi terkait pemahaman, sikap, serta praktik akuntansi yang selama ini dijalankan, termasuk persepsi terhadap penerapan SAK ETAP.
2. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa bukti transaksi, catatan pembukuan, laporan keuangan sederhana, serta dokumen usaha lain yang relevan dengan aktivitas keuangan UMKM.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mencocokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data dokumentasi (Moleong, 2017). Teknik ini bertujuan meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif model Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi agar relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang tersusun secara sistematis untuk menggambarkan kondisi kesiapan UMKM dalam menerapkan SAK ETAP.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data untuk menarik makna, pola, dan hubungan antar data, sekaligus melakukan pengecekan ulang terhadap temuan guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan UMKM Tempe UD. Bismillah dari aspek pengetahuan akuntansi, praktik pencatatan keuangan, serta dukungan terhadap penerapan SAK ETAP secara bertahap dan berkelanjutan.

4. RESULTS AND DISCUSSION

A. Tingkat Penerapan SAK ETAP pada UMKM Tempe UD. Bismillah

Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemilik dan pengelola keuangan UMKM Tempe UD. Bismillah, serta dokumentasi laporan keuangan dan data penjualan periode Januari hingga Agustus. Temuan penelitian difokuskan pada tingkat penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), praktik pencatatan keuangan, kesesuaian dengan ketentuan standar, serta faktor pendukung dan implikasinya.

SAK ETAP ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai standar akuntansi yang disederhanakan untuk entitas kecil dan menengah agar mampu menyusun laporan keuangan yang transparan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sholikin & Setiawan, 2018). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAK ETAP di kalangan UMKM masih tergolong rendah, terutama akibat keterbatasan literasi akuntansi dan sumber daya pendukung.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut juga terjadi pada UMKM Tempe UD. Bismillah. Sebagai usaha yang bergerak di bidang produksi makanan tradisional, UD. Bismillah masih menerapkan sistem pencatatan keuangan sederhana dan belum mengacu secara formal pada ketentuan SAK ETAP. Catatan keuangan disimpan secara manual dan lebih difokuskan pada arus kas masuk dan keluar, tanpa penyusunan laporan keuangan yang komprehensif.

Hal ini sejalan dengan penelitian Khairunnisa et al. (2025) yang menyatakan bahwa sebagian besar UMKM hanya melakukan pencatatan kas sederhana tanpa merujuk pada standar akuntansi yang berlaku. Febrianty & Divianto, (2017) juga menegaskan bahwa rendahnya pemahaman terhadap SAK ETAP menjadi hambatan utama implementasi, diperparah oleh keterbatasan dana untuk mempekerjakan tenaga akuntansi profesional serta minimnya literasi keuangan pelaku usaha (Nurfani et al., 2025). Padahal, penerapan SAK ETAP memiliki manfaat strategis, seperti meningkatkan kualitas informasi keuangan, mempermudah akses permodalan, dan mendukung transparansi pengelolaan usaha (Hetika & Mahmudah, 2017).

1) Praktik Pencatatan Keuangan di UD. Bismillah

Berdasarkan hasil observasi, pencatatan transaksi usaha di UD. Bismillah masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis sederhana. Format pencatatan tidak mengikuti standar akuntansi dan belum memanfaatkan perangkat lunak atau aplikasi pembukuan digital. Adapun praktik pencatatan keuangan yang dilakukan meliputi:

- Pencatatan penerimaan kas, yaitu mencatat total penjualan harian tanpa pemisahan berdasarkan jenis produk atau pelanggan.
- Pencatatan pengeluaran kas, mencakup pembelian bahan baku seperti kedelai, ragi, plastik, biaya operasional (gas dan listrik), serta gaji karyawan, namun tidak disusun dalam laporan bulanan yang sistematis.
- Pencampuran keuangan pribadi dan usaha, sehingga menyulitkan identifikasi laba bersih usaha secara akurat.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Khairunnisa et al. (2025) yang menyatakan bahwa pencatatan manual masih dominan pada UMKM sektor pangan karena pelaku usaha belum melihat urgensi pembukuan formal.

2) Kesesuaian Praktik Keuangan dengan Ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP mengatur bahwa laporan keuangan minimal terdiri dari:

- Laporan posisi keuangan (neraca),
- Laporan laba rugi, dan
- Catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2. Perbandingan antara ketentuan SAK ETAP dan kondisi di UD Bismillah

Komponen Laporan Keuangan SAK ETAP	Kondisi Di UD. Bismillah	Keterangan
Laporan posisi keuangan	Tidak tersedia	Hanya terdapat daftar sederhana aset dan stok
Laporan laba rugi	Tidak formal	Laba dihitung manual dari selisih penjualan dan biaya
Catatan atas laporan keuangan	Tidak formal	Pemilik belum mengetahui format catatan yang dimaksud

Perbandingan antara ketentuan SAK ETAP dan kondisi aktual di UD. Bismillah menunjukkan bahwa sebagian besar komponen laporan keuangan belum terpenuhi secara formal. Laporan posisi keuangan tidak disusun, laporan laba rugi hanya dihitung secara sederhana dari selisih penjualan dan biaya, serta catatan atas laporan keuangan belum dibuat karena pemilik belum memahami format dan fungsinya.

Dari lima indikator utama penerapan SAK ETAP yang dijadikan acuan, hanya sebagian kecil yang terpenuhi. Tingkat penerapan diperkirakan sekitar 37%, yang termasuk dalam kategori rendah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM sektor pangan terhadap SAK ETAP umumnya berada di bawah 50% akibat minimnya literasi dan pendampingan akuntansi.

(Atika Arif)

3) Faktor Pendukung Potensial Penerapan SAK ETAP

Meskipun tingkat penerapan SAK ETAP masih rendah, penelitian ini menemukan beberapa faktor pendukung yang berpotensi dimanfaatkan untuk perbaikan, antara lain:

- a) Kemauan belajar pemilik usaha, yang menunjukkan minat untuk mengikuti pelatihan akuntansi apabila difasilitasi oleh pihak terkait.
- b) Pola transaksi usaha yang relatif rutin dan stabil, sehingga memudahkan penerapan sistem pencatatan yang lebih terstruktur.
- c) Ketersediaan teknologi sederhana, seperti aplikasi pembukuan berbasis smartphone yang mudah diakses dan terjangkau oleh UMKM.

4) Implikasi Temuan Penelitian

Rendahnya tingkat penerapan SAK ETAP di UD. Bismillah memiliki beberapa implikasi strategis, antara lain:

- a) Kesulitan mengakses pembiayaan formal, karena bank dan lembaga keuangan umumnya mensyaratkan laporan keuangan standar dalam pengajuan kredit (Sulistiyowati, 2023).
- b) Terbatasnya kemampuan analisis kinerja usaha, sehingga pemilik kesulitan menilai laba bersih, efisiensi biaya, dan tren penjualan secara akurat.
- c) Risiko ketidaksiapan di masa depan, terutama apabila penerapan standar akuntansi bagi UMKM diwajibkan secara regulatif, yang menuntut adaptasi cepat.

B. Transparansi Keuangan Usaha

Dalam praktiknya, UMKM Tempe UD. Bismillah masih menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sederhana, khususnya terkait arus kas harian. Pencatatan tersebut umumnya hanya berfokus pada pendapatan dari penjualan tempe dan pengeluaran untuk bahan baku seperti kedelai, ragi, plastik, serta biaya operasional lainnya.

Namun demikian, sistem pencatatan yang dilakukan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi, sehingga tingkat transparansi keuangan masih terbatas. Aset tetap berupa peralatan produksi, misalnya, belum dicatat secara sistematis, dan perhitungan laba bersih hanya didasarkan pada selisih antara pendapatan dan pengeluaran tanpa memperhitungkan penyusutan aset. Kondisi ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan belum mencerminkan kondisi usaha secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan transparansi keuangan, UD. Bismillah dapat menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dirancang lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik UMKM. Melalui penerapan SAK ETAP, laporan keuangan dapat disusun secara lebih komprehensif, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan arus kas, sehingga informasi keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai usaha yang bergerak di bidang produksi makanan tradisional, UMKM Tempe UD. Bismillah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kendala tersebut umumnya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman akuntansi, rendahnya literasi keuangan, serta belum adanya kewajiban formal bagi UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi.

Berdasarkan data internal yang dihimpun, kondisi keuangan UD. Bismillah dapat digambarkan melalui laporan laba rugi sederhana berikut.

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Tempe UD. Bismillah

Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Laba Bersih	Keterangan
Januari	47.250.000	24.990.000	22.260.000	Normal
Februari	47.250.000	24.990.000	22.260.000	Normal
Maret	56.700.000	24.990.000	31.710.000	Ramadhan (+20%)
April	61.425.000	24.990.000	36.435.000	Idul Fitri (+30%)
Mei	42.525.000	24.990.000	17.535.000	Pasca Lebaran (-10%)
Juni	47.250.000	24.990.000	22.260.000	Normal
Juli	54.337.500	24.990.000	29.347.500	Musim hajatan (+15%)
Agustus	51.975.000	24.990.000	26.985.000	Musim hajatan (+10%)
Total (8 bln)	408.712.500	199.920.000	208.792.500	

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pencatatan keuangan masih sederhana, UD. Bismillah telah memiliki gambaran arus pendapatan dan laba usaha. Namun, tanpa penerapan standar akuntansi yang sistematis, tingkat transparansi keuangan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, serta penyuluhan dan pendampingan akuntansi sangat diperlukan untuk mendorong UMKM meningkatkan transparansi keuangan melalui penerapan SAK ETAP.

C. Efisiensi Pengelolaan Keuangan UMKM UD. Bismillah

Efisiensi pengelolaan keuangan pada UMKM dapat diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya finansial secara optimal sehingga mampu memperoleh keuntungan maksimal dengan

pengeluaran yang relatif rendah. Bagi UMKM pengolahan tempe seperti UD. Bismillah, efisiensi keuangan menjadi aspek yang sangat penting mengingat besarnya biaya bahan dan operasional, sementara harga jual produk sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar tradisional.

Berdasarkan data penjualan periode Januari–Agustus, UD. Bismillah memproduksi rata-rata 315 bungkus tempe per hari dengan harga jual Rp4.000 per bungkus. Dengan demikian, omzet harian mencapai sekitar Rp1.260.000 atau Rp37.800.000 per bulan. Adapun struktur biaya produksi utama meliputi:

- a. Bahan baku kedelai sebesar Rp450.000 per hari,
- b. Biaya plastik, ragi, gas, minyak, dan transportasi sebesar Rp113.000 per hari,
- c. Upah tenaga kerja sebesar Rp300.000 per hari.

Total biaya produksi mencapai Rp863.000 per hari atau sekitar Rp25.890.000 per bulan.

Dengan struktur biaya tersebut, laba bersih bulanan UD. Bismillah mencapai sekitar Rp11.910.000, atau setara dengan margin laba bersih ±31,5% dari omzet. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan UD. Bismillah dapat dianalisis melalui beberapa indikator berikut.

- 1) Efisiensi Biaya Produksi
 - a) Biaya bahan baku kedelai mencapai sekitar 52,1% dari total biaya produksi.
 - b) Biaya tenaga kerja menyumbang sekitar 34,7%, sedangkan biaya pendukung seperti plastik, gas, ragi, dan minyak sebesar 13,2%.
 - c) Struktur biaya ini menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar berada pada bahan baku dan tenaga kerja, sehingga peluang efisiensi dapat diarahkan pada strategi pembelian kedelai secara grosir atau pengaturan tenaga kerja yang lebih optimal.
- 2) Efisiensi Laba Bersih
 - a. Margin laba bersih sebesar 31,5% tergolong baik untuk UMKM sektor pangan.
 - b. Artinya, setiap Rp100 penjualan mampu menghasilkan laba bersih sekitar Rp31–32.
 - c. Apabila UMKM mampu menekan biaya operasional sebesar 5–10%, maka laba berpotensi meningkat sekitar 10–15% tanpa perlu menaikkan harga jual.
- 3) Efisiensi Pengelolaan Kas
 - a. Laba bersih harian tercatat sekitar Rp397.000.
 - b. Namun, karena belum adanya pemisahan antara kas usaha dan kas pribadi, potensi kebocoran dana relatif tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan penerapan pencatatan keuangan sederhana berbasis harian yang memisahkan kas masuk dan kas keluar usaha secara jelas agar arus kas dapat dikendalikan dengan lebih efektif dan efisien.

D. Laporan Keuangan UMKM Tempe UD. Bismillah terhadap SAK ETAP

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), laporan posisi keuangan (neraca) merupakan salah satu komponen utama yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada periode tertentu. Namun, pada UMKM Tempe UD. Bismillah, laporan posisi keuangan tersebut belum disusun secara formal. Pencatatan yang dilakukan masih terbatas pada daftar sederhana mengenai aset dan persediaan yang dimiliki usaha.

Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan belum mampu menggambarkan posisi keuangan usaha secara menyeluruh sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SAK ETAP. Ketidaaan neraca menyebabkan pemilik usaha tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai struktur keuangan, tingkat kekayaan usaha, serta kewajiban yang dimiliki.

2) Laporan Laba Rugi

Berdasarkan ketentuan SAK ETAP, laporan laba rugi seharusnya disusun secara sistematis dan formal untuk menggambarkan kinerja keuangan usaha dalam suatu periode tertentu. Namun, di UD. Bismillah laporan laba rugi masih disusun secara sederhana dan belum mengikuti format standar akuntansi.

Perhitungan laba dilakukan secara manual dengan cara mengurangkan total pendapatan penjualan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Meskipun metode ini memberikan gambaran umum mengenai keuntungan usaha, pencatatan tersebut belum memenuhi ketentuan akuntansi formal. Akibatnya, analisis kinerja keuangan secara lebih mendalam, serta perbandingan kinerja antarperiode, menjadi sulit untuk dilakukan.

3) Catatan atas Laporan Keuangan

SAK ETAP juga mensyaratkan penyusunan catatan atas laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai rincian akun-akun penting, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta informasi relevan lainnya. Namun, pada UMKM Tempe UD. Bismillah, catatan atas laporan keuangan belum disusun secara formal.

Pemilik usaha belum memahami bentuk, fungsi, maupun format catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP. Akibatnya, informasi pendukung yang seharusnya melengkapi

laporan keuangan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga transparansi dan kelengkapan informasi keuangan masih terbatas.

E. Hasil Laporan Keuangan UMKM Tempe UD. Bismillah terhadap SAK ETAP

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa UMKM Tempe UD. Bismillah merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang produksi tempe dan berlokasi di pasar tradisional. Usaha ini melakukan kegiatan produksi secara rutin setiap hari dengan bahan baku utama berupa kacang kedelai, serta memasarkan produknya secara eceran kepada konsumen.

Namun, dari sisi pengelolaan keuangan, pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana dan bersifat manual, yaitu menggunakan buku tulis untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran harian. Tidak ditemukan adanya laporan keuangan formal seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK ETAP (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Menurut Febriyanti (2018), kondisi tersebut merupakan fenomena yang umum terjadi pada UMKM di Indonesia. Banyak pelaku usaha kecil belum menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi karena keterbatasan pengetahuan akuntansi serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat laporan keuangan formal. Pelaku UMKM cenderung lebih memprioritaskan kegiatan operasional dan penjualan dibandingkan administrasi keuangan, sehingga pencatatan keuangan dilakukan hanya untuk kebutuhan praktis sehari-hari.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Khairunnisa et al. (2025) yang menyatakan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia belum mampu menerapkan SAK ETAP secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi minimnya literasi akuntansi, keterbatasan pelatihan, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Akibatnya, pencatatan keuangan UMKM umumnya hanya mencakup transaksi dasar tanpa memperhatikan aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai standar.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai UMKM Tempe UD. Bismillah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan SAK ETAP dan Transparansi Keuangan, UMKM Tempe UD. Bismillah masih menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sederhana dalam pengelolaan usahanya. Pencatatan tersebut pada dasarnya telah memenuhi sebagian unsur dasar akuntansi, khususnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Namun demikian, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) secara menyeluruh belum terlaksana secara optimal, terutama dalam penyusunan laporan keuangan formal seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan arus kas. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan melalui penerapan standar akuntansi yang lebih terstruktur.
2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan, Dari sisi efisiensi, UD. Bismillah telah mampu mengelola biaya produksi dan operasional secara relatif baik, meskipun belum didukung oleh sistem pembukuan yang memadai. Ketiadaan pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha serta belum adanya pencatatan aset dan penyusutan secara sistematis berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP diharapkan dapat membantu usaha dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan pengambilan keputusan keuangan.
3. Kinerja Keuangan Usaha, Analisis laporan laba rugi periode Januari hingga Agustus menunjukkan bahwa UMKM Tempe UD. Bismillah memiliki margin laba bersih sekitar 31,5 persen, yang tergolong baik untuk skala UMKM di sektor pangan. Pola laba yang dihasilkan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh momen musiman, seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan musim hajatan, yang berdampak pada peningkatan permintaan produk. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi pasar yang kuat dan mampu menghasilkan keuntungan yang stabil.

Secara keseluruhan, UMKM Tempe UD. Bismillah memiliki prospek usaha yang baik dan berkelanjutan. Namun, untuk mendukung pengembangan usaha ke tingkat yang lebih profesional, diperlukan perbaikan pada sistem pencatatan keuangan, penerapan SAK ETAP secara bertahap, serta penguatan manajemen biaya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan daya saing usaha di masa mendatang.

REFERENCES

- Amanda, A. T., & Rialdy, N. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM Kota Dumai.

- Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1812–1829. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3916>
- Candra, H., & Hidayatullah, S. (2024). Analisis implementasi SAK EMKM dalam meningkatkan transparansi keuangan pada UMKM sektor perdagangan di Tangerang Selatan. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*, 1(2), 49–58.
- Febrianty, F., & Divianto, D. (2017). Pengaruh pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan terhadap implementasi laporan keuangan berdasar SAK ETAP dengan persepsi pelaku UMKM sebagai variabel moderasi. *International Journal of Social Science and Business*, 1(3), 166–176. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i3.11318>
- Hanifah, R. U., Rizkiana, C., & Riyanto, S. (2023). Pemberdayaan UMKM dalam penerapan akuntansi UMKM berbasis aplikasi sederhana. *TEMATIK*, 3(2), 107–112. <https://doi.org/10.26623/tmt.v3i2.7365>
- Harahap, L. M., Saragih, A. B. B. J., Ramadhan, R., Surbakti, O. M., & Gerald, J. (2025). Peran UMKM dalam sistem perekonomian Indonesia: Tantangan dan peluang pasca pandemi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 78–85. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.430>
- Hetika, H., & Mahmudah, N. (2017). Penerapan akuntansi dan kesesuaianya dengan SAK ETAP pada UMKM Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 259–266. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.531>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jamil, M., Mutmainnah, D., & Azizah, M. (2022). Pendampingan manajemen usaha dan manajemen keuangan pada UMKM Bakul Kembang Official Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya. *Share: Journal of Service Learning*, 8(2), 196–207. <https://doi.org/10.9744/share.8.2.196-207>
- Khairunnisa, A., Nafrilla, D., Hani, F., Pratama, R. A., Dwianti, I., & Septiana, E. (2025). Implementasi SAK UMKM dalam pelaporan keuangan sederhana UMKM kuliner atau UMKM produsen cemilan. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 431–438. <https://doi.org/10.61722/japm.v3i4.6079>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nurfani, N., Suhety, Y., & Zakaria, I. (2025). Dampak penggunaan teknologi akuntansi berbasis digital terhadap efisiensi pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 649–663. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.583>
- Octavina, L. A., & Rita, M. R. (2021). Digitalisasi UMKM, literasi keuangan, dan kinerja keuangan: Studi pada masa pandemi COVID-19. *Perbanas Journal of Business and Banking*, 11(1), 73–92. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2552>
- Oktaritama, E. D., & Januarti, I. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman bagian akuntansi koperasi atas standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). *Indicators: Journal of Economic and Business*, 1(1), 65–72. <https://doi.org/10.47729/indicators.v1i1.54>
- Pardita, I. W. A., Julianto, I. P., & Kurniawan, P. S. (2019). Pengaruh tingkat penerapan sistem pencatatan akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan tingkat kesiapan pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 10(3), 286–297. <https://doi.org/10.23887/jimat.v10i3.22803>
- Ramadhan, R., Ma'sumah, S., & Setyasiyah, R. D. (2024). Analisis implementasi SAK EMKM pada usaha mikro, kecil, dan menengah: Studi kasus UMKM Kars Production. *Economics, Social, and Humanities Journal (ESOCHUM)*, 4(1), 12–26.
- Sa'adah, U. (2025). *Analisis kesiapan UMKM dalam penerapan SAK EMKM (Studi pada UD Dani Musafa)* [Diploma thesis, Universitas Putra Bangsa].
- Sholikin, A., & Setiawan, A. (2018). Kesiapan UMKM terhadap implementasi SAK EMKM (studi UMKM di Kabupaten Blora). *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1(2), 35–50. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1441>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, Y. (2023). Pengaruh penggunaan teknologi akuntansi terhadap efisiensi pengelolaan keuangan UMKM di Kota Malang. *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.22437/pim.v11i1.25919>
- Sulistiyowati, A., & Prasetyo, D. (2020). Tantangan penerapan SAK ETAP pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(1), 89–101.